

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung.

Asshiddiqie, Jimly 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*,
Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.

Budiono, Herlien, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Buku 1*, Jakarta : Sinar Harapan.

Lumbun Tobing, G.H.S, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

M. Hadjon, Philipus dkk, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction to
the Indonesian Administrative Law* , Cetakan 7, Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press.

Mahfud MD, Moh dan SF. Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*,
Yogyakarta : Liberty.

Martua Batubara, 12 Mei 2012, *Makalah Penguatan Fungsi Kelembagaan Majelis
Pengawas Notaris*, Jambi.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu,
Sekarang Dan Di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia.

- Rahmadi, Takdir dan Firman Hasan, 2002, *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*,
Citra Budaya Indonesia, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Santoso, M. Agus, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*,
Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
Press.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta : Rajawali
Pers.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik
Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*,
Ringkasan Disertasi, Padang : Universitas Andalas.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris

Sementara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. .02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

